



**KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-669/MK.02/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-119.01-0/2020 tanggal 12 November 2019 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1193/AG/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pengesahan Revisi Anggaran;
 4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1372/AG/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengesahan Revisi Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 31 Agustus 2020

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,




Aan Kurnia, S. Sos., M. M.

Laksamana Madya TNI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
(PPPA) BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla RI memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Arah ke depan, Bakamla RI akan bertransformasi menjadi *Coast Guard* yang bersifat *Single Agency Multi Tasks* yang merupakan lembaga sipil yang bertanggungjawab terhadap keamanan maritim Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI dalam menghadapi ancaman dan tantangan keamanan maritim Indonesia, maka diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 3 dinyatakan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Guna terlaksananya program dan kegiatan Bakamla RI TA. 2020 yang lebih terarah, terukur, akuntabel serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diatur pengelolaan anggaran yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020.

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) merupakan dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan pada tingkat unit organisasi. PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berisi tentang gambaran mengenai kebijakan, sasaran dan prioritas kegiatan yang ingin dicapai, materiil dan anggaran selama kurun waktu satu tahun anggaran. PPPA menjadi pedoman bagi Bakamla RI untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsinya dalam mewujudkan visi misi organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di tingkat unit kerja di seluruh jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

2. Tujuan

PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020 disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ditetapkan sehingga lebih terarah, terukur, akuntabel serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mendukung tugas pokok Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020 meliputi uraian tugas, kebijakan, sasaran pembangunan, jabaran program dan anggaran serta pengelolaan program dan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA 2020, dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Bab III Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Bab IV Pengelolaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Bab V Penutup.

BAB II
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi ekonomi sangat besar. Posisi dan konstelasi geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan khususnya bagi Bakamla RI, yaitu:

1. di antara dua benua dan dua samudera;
2. dua selat internasional sebagai SLOC – SLOT;
3. tiga ALKI dan empat *choke point*;
4. negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau;
5. panjang garis pantai 108.000 km;
6. luas laut 6,4 juta km²; dan
7. lebih dari 7000 kapal melintas setiap hari.

Selain itu, kondisi perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara di laut menghadirkan tantangan lain. Saat ini masih terdapat permasalahan batas maritim terutama di ZEE, adanya insiden dengan aparat maritim Malaysia dan Vietnam di *dispute area*.

Selanjutnya, sikap asertif China di Laut China Selatan menimbulkan dinamika konflik yang berimplikasi pada permasalahan yang menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. China berpendirian tentang klaimnya terkait *Nine-dash line* dan membangun pangkalan militer. *Nine-dash line* atau sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan.

Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan laut di Indonesia baik internal maupun eksternal. Ancaman tersebut adalah ancaman tradisional dan non tradisional. Ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan ke depan antara lain sengketa perbatasan dan sengketa Laut Cina Selatan. Ancaman non tradisional pada keamanan maritim Indonesia di

antaranya adalah perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan di laut (*piracy*), *Transnational Organized Crimes* seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, *illegal entry*, terorisme dan penyelundupan BBM.

Menyadari pentingnya keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia, maka guna pengendalian dan penguasaan laut dalam rangka pengamanan wilayah laut dan guna terwujudnya kondisi stabilitas keamanan maritim nasional serta mengantisipasi, mencegah serta menindak berbagai ancaman faktual/nyata di atau lewat laut di wilayah perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia dalam rangka kepentingan nasional, maka pemerintah membentuk Bakamla RI yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan berdasarkan Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Bakamla RI memiliki tugas utama untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Perkembangan lingkungan strategis dan ancaman-ancaman terhadap keamanan laut merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan Bakamla RI menjadi *Coast Guard* yang bersifat *Single Agency Multi Task*. Bakamla RI sebagai *Coast Guard* diharapkan mampu mengemban tiga tugas *universal* yaitu *maritime security*, *maritime safety* dan *maritime defense*.

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada konsep operasi Bakamla RI, yang terdiri dari:

1. Puskodal, terdiri dari *Command Center* HQ dan *sub/other Command Center*;
2. 77 kapal, terdiri dari 19 Kapal Patroli Lepas Pantai dan 1 Kapal Latih berukuran 80 M s.d 110 54 M, 57 Kapal Patroli Pantai berukuran 48 M s.d. 60 M;
3. 6 Pesud Maritim pada Daerah Operasi Maritim (DOM) prioritas tinggi;
4. 29 Heli patrol berkemampuan *Maritime Interdiction Operations* (MIO) untuk tiap *Coastal Station* dan elabuhan besar Indonesia; Belawan,

- Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Tarakan, Makasar, Manado, Ambon, Jayapura/Sorong, Merauke;
5. 29 RHIB/Catamaran untuk tiap *Coastal Station* dan Pelabuhan besar Indonesia; Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Tarakan, Makasar, Manado, Ambon, Jayapura/Sorong, Merauke;
 6. 32 UAV yang bisa dioperasikan dari Pangkalan maupun dari Kapal untuk tiap *Coastal Station* dan Pelabuhan besar Indonesia; Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Tarakan, Makasar, Manado, Ambon, Jayapura/Sorong, Merauke; dan
 7. Pangkalan, disesuaikan dengan konsep penggelaran operasional secara menyeluruh.

Selain itu, arahan kebijakan dan strategi Bakamla RI juga mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Bakamla RI 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) 2005 – 2025 yang merupakan panduan bagi perencanaan pembangunan kelembagaan Bakamla RI Tahun 2020, yang terdiri dari:

Arah Kebijakan I: Penguatan operasi keamanan dan keselamatan laut melalui kegiatan operasi yang sinergi dengan mengedepankan pendekatan kesatuan upaya (*unity of effort*) yang mengoptimalkan sistem informasi dan komando pengendalian terintegrasi terutama di wilayah perbatasan, pulau terluar dan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi oleh satuan atau unsur laut maupun udara yang terlatih dengan baik, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Menyusun strategi keamanan dan/atau keselamatan laut guna meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan;
2. Menyusun rencana strategi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, terutama perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan dalam kerangka *unity of effort* atau *interagency process*;
3. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia secara

- bersinergi, terutama wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan;
4. Penguatan regulasi bagi pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia terutama wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan dalam kerangka *unity of effort* atau *interagency process*;
 5. Meningkatkan kehadiran unsur patroli Bakamla RI bagi pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan terutama wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan; dan
 6. Meningkatkan target kinerja operasi/patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia secara bersinergi terutama di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan.

Arah Kebijakan II: Penyiapan SDM yang diutamakan bagi pengawakan Kapal Patroli, Pesawat Udara, Puskodal, SPKKL, GS, Unit Penindakan Hukum (UPH) dan *Special Response Team* (SRT) yang berkarakter dasar terdiri dari kecerdasan (*intelligence*), keberanian (*courage*), keteguhan (*persistence*) dan memiliki jiwa patriot, integritas tinggi serta kecakapan kebaharian, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas SDM di bidang operasi, sistem peringatan dini, hukum dan *Special Response Team* (SRT);
2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang operasi, sistem peringatan dini, hukum dan *Special Response Team* (SRT); dan
3. Internalisasi nilai dan budaya organisasi serta peningkatan profesionalisme personel Bakamla RI.

Arah Kebijakan III: Penguatan sarana prasarana keamanan dan keselamatan laut yang diutamakan kepada pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan unsur laut dan udara untuk menyelenggarakan operasi keamanan dan keselamatan laut serta pembangunan sistem pangkalan untuk menunjang operasi di daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan; pembangunan dan pengembangan SPKKL maupun GS; serta sistem dukungan logistik yang mampu mendukung ketahananlamaan atau

sustainability operasi keamanan dan keselamatan laut, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan revitalisasi/peremajaan/pemeliharaan/perawatan unsur patroli dan sistem peringatan dini Bakamla RI; dan
2. Membentuk sistem guna mendukung pelaksanaan operasi di daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan.

Arah Kebijakan IV: Penguatan sistem komando pengendalian berbasis sistem informasi dan komputer yang bersifat *open - ended*, tahan retas dan mampu menjamin integritas data untuk menunjang operasi keamanan dan keselamatan laut dengan mengutamakan pada penyiapan sistem dalam menerima, mengolah dan diseminasi data dan informasi kepada K/L terkait, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personel dalam melakukan pengumpulan dan analisis data dan penyajian informasi;
2. Meningkatkan kemampuan teknologi deteksi ancaman keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Meningkatkan kemampuan pengintegrasian data dan informasi keamanan serta keselamatan laut yang dimiliki kementerian/lembaga terkait;
4. Menyusun konsep pengamanan data dan informasi keamanan serta keselamatan laut pada sistem peringatan dini;
5. Merevitalisasi Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) menjadi *National Maritime Security and Safety Fusion Center*, dan
6. Membentuk kerangka hukum dan kerja sama serta penatalaksanaan *National Maritime Security and Safety Fusion Center*.

Arah Kebijakan V: Penguatan penanganan kasus dan penindakan hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui pembangunan kapasitas yang diutamakan pada aspek SDM baik secara mandiri maupun dalam kerangka kerjasama (dalam negeri maupun luar negeri) serta peningkatan sinergitas antar K/L terkait, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Membentuk tim gabungan penanganan perkara tindak pidana di laut bersama antara Bakamla RI dan kementerian/lembaga terkait;
2. Menyusun penatalaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana hasil tangkapan operasi Bakamla RI;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian; dan
4. Tindak pidana hasil tangkapan operasi Bakamla RI.

Arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan turunan pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan langkah pertama dalam Rencana Strategis Bakamla RI 2020-2024 yang merupakan turunan dari RPJMN 2020-2024. Di mana RPJMN 2020-2024 merupakan tahap terakhir di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025.

Melalui arah kebijakan dan strategi Bakamla RI yang telah dirumuskan, diharapkan Bakamla RI dapat melaksanakan tugas yang diemban secara baik, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tugas Bakamla RI, yaitu amannya *choke point* di seluruh perairan Indonesia, terjaminnya keamanan ALKI, terjaganya kedaulatan NKRI, tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia, pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa serta tercapainya visi poros maritim dunia.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai yang tertera pada Rencana Kerja Bakamla RI TA. 2020 dan rancangan Renstra Bakamla RI 2020-2024 yaitu:

1. Tujuan;

- a. Terwujudnya Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan Internasional;
- b. Terwujudnya penegakan hukum berdasarkan Sistem Informasi/Sistem Peringatan Dini dan *Coast Guard* Diplomasi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- c. Terwujudnya kapasitas kelembagaan, tersedianya sarana dan prasarana operasi keamanan dan keselamatan laut dan sumber daya manusia yang profesional, handal dan unggul.

2. Sasaran Strategis;

Fokus pencapaian tugas Keamanan Laut Republik Indonesia adalah :

- a. Amannya *choke point* di seluruh perairan Indonesia;
- b. Terjaminnya keamanan ALKI;
- c. Terjaganya kedaulatan NKRI;
- d. Tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia;
- e. Pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa; dan
- f. Tercapainya visi poros maritim dunia.

Dalam rangka pencapaian tugas tersebut di atas, maka sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah :

- a. Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut;
- c. Meningkatkan diplomasi maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- d. Tersedianya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis konsep operasi keamanan laut;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut; dan
- g. Meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen.

BAB III
PROGRAM DAN ANGGARAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Dalam rangka mencapai sasaran dan visi misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, maka dirumuskanlah kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam struktur program dan anggaran. Penyusunan program dan anggaran Bakamla RI menggunakan pendekatan anggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dan visi misi Organisasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan di atas, ditentukan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam struktur program dan anggaran berikut penetapan alokasi anggarannya. Proses penyusunan program dan anggaran TA 2020 ini menggunakan pendekatan anggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Upaya-upaya yang dilakukan agar kegiatan yang disusun dapat serealistik mungkin, efektif-efisien dan sejalan dengan tuntutan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, maka prioritas pencapaian sasaran telah mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, prediksi ancaman dan kondisi saat ini serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah serta direktif pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

B. Struktur Program dan Anggaran

Struktur penyusunan program dan anggaran TA. 2020 yang disusun merupakan pendekatan sesuai struktur organisasi dimana pejabat struktural Eselon I bertanggungjawab pada pelaksanaan program sedangkan Eselon II pada pelaksana kegiatan sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Atau dalam tataran manajemen strategis Eselon I bertanggungjawab pada pencapaian *outcome* (hasil), sedangkan Eselon II bertanggungjawab pada pencapaian *output* (keluaran).

Semuanya itu mengacu kepada Buku Restrukturisasi yang ditetapkan oleh Bappenas.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini terdapat 2 (dua) program yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla RI dengan 4 kegiatan; dan Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut dengan 3 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla RI (119.01.01) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 3967 Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla RI
 - 3967.001 Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 3967.002 Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 3967.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 3967.956 Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)
- 3968 Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi
 - 3968.952 Layanan Perencanaan
 - 3968.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - 3968.960 Layanan Manajemen Organisasi
- 3969 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla RI
 - 3969.965 Layanan Audit Internal
- 5734 Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Bakamla RI
 - 5734.954 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 5734.955 Layanan Manajemen Keuangan
 - 5734.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 - 5734.959 Layanan Protokoler

- 5734.962 Layanan Umum
- 5734.994 Layanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut (119.01.06) dengan rincian sebagai berikut:

- 5735 Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5735.001 Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5735.002 Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim
 - 5735.003 Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5735.004 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri
 - 5735.005 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Luar Negeri
 - 5735.006 Operasi Udara
 - 5735.007 Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral
 - 5735.008 Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut

- 5736 Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5736.001 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5736.002 Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5736.003 Penelitian dan Pengembangan Kamla

- 5737 Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5737.001 Data dan Informasi Kamla
 - 5737.002 Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla
 - 5737.003 Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla
 - 5737.004 Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut
 - 5737.005 Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam suatu rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja beserta pemanfaatan anggarannya apakah berupa keberhasilan atau kegagalan dari suatu output program/kegiatan, maka perlu adanya indikator keluaran yang dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Dengan adanya pengukuran terhadap indikator kinerja akan dapat diketahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun rincian sasaran dan indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja (RENJA) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (*outcome/impact*) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan bagian penting dalam suatu perencanaan yaitu kondisi secara nyata yang ingin dicapai oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan memberikan hasil dan dampak bagi para *stakeholder*.

Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020
01.	<u>Sasaran Strategis:</u> Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia <u>Indikator Kinerja:</u>	
01.01	Persentase penurunan kasus kejahatan di laut	10
02.	<u>Sasaran Strategis:</u> Tersedianya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia <u>Indikator Kinerja:</u>	
02.01	Persentase naskah kebijakan keamanan dan keselamatan laut nasional yang direkomendasikan menjadi peraturan perundangan	11.11
03.	<u>Sasaran Strategis :</u> Mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut <u>Indikator Kinerja:</u>	
03.01	Relay Time pada gangguan keamanan dan keselamatan laut	300 Menit
04.	<u>Sasaran Strategis:</u> Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis konsep operasi keamanan laut	

Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020
04.01	<u>Indikator Kinerja:</u> Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang operasi	80
05.01	<u>Sasaran Strategis:</u> Meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen <u>Indikator Kinerja:</u> Indeks penilaian reformasi birokrasi	55
06.01	<u>Sasaran Strategis:</u> Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut <u>Indikator Kinerja:</u> Jumlah SDM yang bersertifikasi internasional	7
07.01	<u>Sasaran Strategis:</u> Meningkatkan diplomasi maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia <u>Indikator Kinerja:</u> Persentase pelaksanaan kerjasama dalam negeri	100
07.02	Persentase pelaksanaan kerjasama luar negeri	100

**2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program
(119.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Bakamla RI**

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
01.01.	<u>Sasaran Program :</u> Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini	
01.01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang operasi	80
01.01.02	Persentase terpenuhinya sarana prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal sesuai dengan rencana	70
01.01.03	Persentase kesiapsiagaan sistem peringatan dini (<i>Continuity of service</i>)	65
01.01.04	Persentase utilisasi aset	80
01.02	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Tata Kelola Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	
	<u>Indikator Kinerja :</u>	
01.02.01	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	55
01.02.02	Nilai SAKIP	CC
01.02.03	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	80
01.02.04	Indeks penyelesaian peraturan perundang-undangan	30
01.02.05	Indeks penyelesaian penataan organisasi	30

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
01.02.06	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3
01.02.07	Jumlah pelaporan internal	5
01.02.08	Jumlah pelaporan eksternal	6
01.02.09	Realisasi anggaran	95
01.02.10	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun	2
01.02.11	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	2
	<u>Sasaran Program :</u>	
01.03	Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggan, kehumasan, keprotokolan, arsip dan dokumentasi yang tertib dan akuntabel	
	<u>Indikator Kinerja :</u>	
01.03.01	Jumlah SDM yang bersertifikasi	7
01.03.02	Internasional	80
01.03.03	Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal baik	3
01.03.04	Penerbitan peraturan internal kepegawaian	2620
01.03.05	Penyelesaian dokumen tagihan	2620
01.03.06	Pelaksanaan transaksi pembayaran	2
01.03.07	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu	91
01.03.08	Persentase pemberitaan positif Bakamla RI	90
01.03.09	Persentase pelaksanaan kegiatan	95
01.03.10	keprotokoleran Kepala Bakamla RI yang berjalan lancar	12
	Indeks ANRI	
	Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran	

(119.01.06) Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
06.01	<u>Sasaran Program :</u> Meningkatkan keberhasilan operasi keamanan dan keselamatan laut <u>Indikator Kinerja :</u> Indeks Kepuasan Stakeholders	
06.01.01	Persentase penurunan kasus kejahatan laut	10
06.01.02	Response time pada gangguan keamanan dan keselamatan laut	5
06.01.03	Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi laut yang terlaksana	14
06.01.04	Jumlah operasi laut dalam negeri	19
06.01.05	Jumlah operasi laut luar negeri	4
06.01.06	Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi udara yang terlaksana	14
06.01.07	Jumlah operasi udara dalam negeri	171
06.01.08	Jumlah operasi udara luar negeri	4
06.01.09	Jumlah kegiatan dukungan kesiapan latihan yang terlaksana	5
06.01.10	Jumlah personel yang dilatih	261
06.02	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) <u>Indikator Kinerja :</u>	
06.02.01	Persentase jumlah kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah	11

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
06.02.02	yurisdiksi Indonesia yang ditetapkan/disahkan Persentase jumlah strategi atas kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	20
06.02.03	yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) Persentase jumlah penelitian dan pengembangan (<i>litbang</i>) yang dapat mendukung kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	20
06.03	<u>Sasaran Program :</u> Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi	
06.03.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase keberlangsungan layanan (<i>continuity of service</i>) jaringan Bakamla RI	100
06.03.02	Persentase ancaman gangguan keamanan dan terhadap system jaringan Bakamla RI yang diselesaikan	100
06.03.03	Persentase layanan jaringan tertutup bagi mitra Bakamla RI pengguna aplikasi Sistem Peringatan Dini	100
06.03.04	Rekapitulasi data kerawanan internal dan eksternal keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah	12

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
	yurisdiksi Indonesia	
06.03.05	Jumlah peta kerawanan keamanan dan keselamatan laut Indonesia	12
06.03.06	Jumlah pengumpulan data dan validasi kerawanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	
06.03.07	Jumlah pertukaran informasi dengan mitra Bakamla RI	
06.03.08	Jumlah fasilitasi Sistem Peringatan Dini bagi mitra Bakamla RI dalam rangka perwujudan pelayanan publik Bakamla RI untuk membangun SPD	
06.03.09	Jumlah analisa bulanan <i>anomaly</i> yang	12
06.03.10	tervalidasi	
06.03.11	Relay time pada gangguan keamanan dan keselamatan laut	
06.03.12	Persentase permohonan pendampingan, pertimbangan dan advokasi hukum yang ditindaklanjuti	
06.03.13	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi hukum Persentase penyelesaian rancangan dan peraturan perundangan yang mendukung otoritas Bakamla RI sebagai Coast Guard	
06.03.14	Indonesia	100
06.03.15	Persentase pelaksanaan kerjasama dalam	100
06.03.16	negeri	100
06.03.17	Persentase pelaksanaan kerjasama luar negeri	4
	Persentase penyerahan kasus ke stakeholder penyidik	
	Jumlah pembentukan relawan penjaga laut	

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2020
	nusantara	

3. Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla RI

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana, Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla RI		Biro Sarpras
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal sesuai dengan rencana	70%	
01.02	Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang operasi	80%	
01.03	Persentase kesiapsiagaan sistem peringatan dini (<i>continuity of service</i>)	65%	
01.04	Persentase utilisasi aset	80%	
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja serta Manajemen Organisasi		Biro Ren dan Org

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Terwujudnya penyusunan rencana program dan anggaran, tata kelola kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel		
	<u>Indikator Kinerja :</u>		
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi	55	
01.02	Nilai SAKIP	CC	
01.03	Persentase Kesesuaian perencanaan dan penganggaran	80	
01.04	Indeks penyelesaian rancangan peraturan	30	
01.05	Persentase penyelesaian penataan organisasi	30	
01.06	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3	
01.07	Jumlah pelaporan eksternal	6	
01.08	Jumlah pelaporan internal	5	
01.09	Realisasi anggaran	95	
01.10	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun	2	
01.11	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	2	
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla		Inspektorat
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Terwujudnya Pengawasan Intern yang Efektif dan Mendorong		

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
	Peningkatan Akuntabilitas Bakamla RI		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Opini BPK	WDP	
01.02	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti	80	
5734	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla		Biro Umum
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kehumasan, Keprotokolan, Arsip dan Dokumentasi yang Tertib dan Akuntabel		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Jumlah SDM yang bersertifikat internasional	7	
01.02	Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal baik	80	
01.03	Penerbitan peraturan internal kepegawaian	3	
01.04	Penyelesaian dokumen tagihan	2620	
01.05	Pelaksanaan transaksi pembayaran	2620	
01.06	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu	2	
01.07	Persentase pemberitaan positif Bakamla RI	91	
01.08	Persentase pelaksanaan kegiatan	90	

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
	keprotokoleran Kepala Bakamla RI yang berjalan lancar		
01.09	Indeks ANRI	95	
01.10	Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran	12	

2) Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut		Deputi Operasi dan Latihan
5735.0 1	Dukungan kesiapan operasi keamanan dan keselamatan laut		Dir. Ops Laut
01. 01.01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Dukungan kesiapan operasi keamanan dan keselamatan laut <u>Indikator Kinerja</u> Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi keamanan dan keselamatan laut	14 keg	
5735.0 2	Dukungan kesiapan operasi udara maritim		Dir. Ops Udara
01. 01.01	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Dukungan kesiapan operasi udara maritim <u>Indikator Kinerja :</u> Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi udara maritim	14 Keg	

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
5735.0 3	Dukungan Kegiatan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut		Dir. Latihan
01. 01.01	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Dukungan Latihan keamanan dan keselamatan laut <u>Indikator Kinerja :</u> Jumlah kegiatan dukungan kesiapan latihan yang terlaksana	5 Keg	
5735.0 4	Operasi Laut Dalam Negeri		Dir. Ops Laut
01. 01.01 01.02 01.03	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Operasi laut dalam negeri <u>Indikator Kinerja :</u> Operasi laut dalam negeri Persentase penurunan kasus kejahatan laut Response time pada gangguan keamanan dan keselamatan laut	21 HO dan 156 HO 10% 60 Jam	
5735.0 6	Operasi Udara Dalam Negeri		Dir. Ops Udara
01	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Operasi udara dalam negeri <u>Indikator Kinerja :</u>	221 Jam	

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
01.01	Operasi udara dalam negeri	dan 175 Jam	
5735.0 8	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut		Dir. Latihan
	Sasaran Kegiatan :		
01. 01.01	Latihan keamanan dan keselamatan laut Indikator Kinerja : Jumlah personel yang dilatih	 880 orang	
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut		Deputi Kebijakan dan Strategi
5736.0 1	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut		Dir. Kebijakan
01. 01.01	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut <u>Indikator Kinerja :</u> Persentase Kebijakan Nasional di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang ditetapkan/disahkan	 11%	
5736.0	Rancangan Strategi		Dir. Strategi

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
2	Keamanan dan Keselamatan		
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Rancangan strategi keamanan dan keselamatan laut		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase jumlah strategi atas kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	20%	
5736.0	Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Keselamatan Laut		Dir. Litbang
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Penelitian dan pengembangan		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase jumlah penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan laut	20%	
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut		Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama
5737.0	Data dan Informasi Keamanan Laut		Dir. Datin
1			

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Data dan informasi keamanan dan keselamatan laut		
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Terjaminnya keberlangsungan layanan (<i>continuity of service</i>) jaringan Bakamla RI	100%	
01.02	Terselesainya ancaman gangguan keamanan terhadap system jaringan Bakamla RI	100%	
01.03	Terlaksananya layanan jaringan tertutup bagi mitra Bakamla RI pengguna aplikasi Sistem Peringatan Dini	100%	
01.04	Rekapitulasi data kerawanan internal dan eksternal keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	12 Data	
01.05	Jumlah peta kerawanan keamanan dan keselamatan laut Indonesia	12 Peta	
01.06	Jumlah pengumpulan data dan validasi kerawanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	12	
01.07	Jumlah pertukaran informasi dengan mitra Bakamla RI	5 Keg	
01.08	Jumlah fasilitasi Sistem Peringatan Dini bagi mitra Bakamla RI dalam rangka	5 Ins	

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
01.09	perwujudan pelayanan publik Bakamla RI untuk membangun SPD Jumlah analisa bulanan anomaly yang tervalidasi	12 Laporan	
5737.0 2	Advokasi dan Penegakan Hukum Keamanan Laut		Dir. Hukum
01. 01.01 01.02 01.03	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Terwujudnya Advokasi dan Penegakan Hukum Keamanan Laut <u>Indikator Kinerja :</u> Persentase permohonan pendampingan, pertimbangan dan advokasi hukum yang ditindaklanjuti Jumlah penyuluhan dan sosialisasi hukum Persentase penyelesaian rancangan dan peraturan perundangan yang mendukung otoritas Bakamla RI sebagai Coast Guard Indonesia	37 Keg 100% 9 Keg 50%	
5737.0 3	Kegiatan dan Forum Kerjasama Keamanan Laut		Dir. Kerjasama
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Kegiatan dan forum kerjasama kamla	16 Keg	

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Unit Eselon II
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase pelaksanaan	100 %	
01.02	kerjasama dalam negeri Persentase pelaksanaan	100 %	
01.03	kerjasama luar negeri Jumlah pembentukan relawan penjaga laut nusantara	4 Wil	
5737.0 4	Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut	100%	Kepala UPH
01.	<u>Sasaran Kegiatan :</u> Penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut	45 Kasus	
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Persentase penyerahan kasus ke stakeholder penyidik	100 %	
5737.0 5	Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut		KPIML
	<u>Sasaran Kegiatan :</u>		
01.	Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut	4 Keg	
01.01	<u>Indikator Kinerja :</u> Relay time pada gangguan keamanan dan keselamatan laut	300 Menit	

D. Anggaran

Alokasi anggaran Bakamla RI T.A. 2020 secara keseluruhan sebesar Rp. 565.473.073.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Bakamla RI dengan anggaran Rp 351.289.380.000,- dan Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut dengan anggaran Rp 214.183.693.000,-. Pagu anggaran Bakamla RI pada revisi 3 TA. 2020 mengalami peningkatan akibat adanya tambahan anggaran dari BA BUN (BA 999.08) sebesar Rp 122.867.570.000,- (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Alokasi anggaran tersebut telah mewisadahi kebutuhan dasar dan rutin perkantoran seperti, pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 dan 14, operasional perkantoran serta operasional kegiatan Bakamla RI dalam satu tahun anggaran. Adapun rincian alokasi anggaran Bakamla RI T.A. 2020 sebagai berikut :

a. Per Jenis Belanja

1) Belanja Pegawai (51)	:	Rp 60.216.558.000,-	[10,65%]
2) Belanja Barang (52)	:	Rp 317.493.788.000,-	[56,15%]
3) Belanja Modal (53)	:	Rp 187.762.727.000,-	[33,20%]
Jumlah :		Rp 565.473.073.000,-	[100%]

b. Per Jenis Belanja Operasional dan Non Operasional

1) Belanja Operasional	:	Rp 99.550.661.000,-	[17,60%]
▪ Gaji/ Tunjangan (001)	:	Rp 60.216.558.000,-	[10,65%]
▪ Operasional Kantor (002)	:	Rp 39.334.103.000,-	[6,95%]
2) Belanja Non Operasional	:	Rp 465.922.412.000,-	[82,40%]
▪ Bel. Barang Non Ops	:	Rp 245.272.385.000,-	[43,38%]
▪ Bel. Modal Non Ops	:	Rp 187.762.727.000,-	[33,20%]
▪ Operasional Tusi (005)	:	Rp 32.887.300.000,-	[5,82%]

Jumlah (1 + 2) : Rp 565.473.073.000,- [100%]

c. Per Kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional

1) Prioritas Nasional	:	Rp 167.557.396.000,-	[37,85%]
2) Non Prioritas Nasional	:	Rp 275.048.107.000,-	[62,14%]
Jumlah :		Rp 442.605.503.000,-	[100%]

d. Per Program dan Kegiatan

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla (119.01.01) sebesar Rp 351.289.380.000,- dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :
 - 3967 Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla RI, sebesar Rp 201.043.122.000,-
 - 3968 Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi, sebesar Rp 2.303.707.000,-
 - 3969 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla, sebesar Rp. 877.905.000,-
 - 5734 Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla, sebesar Rp 147.064.646.000,-

- 2) Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut (119.01.06) sebesar Rp 214.183.693.000,- dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :
 - 5735 Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, sebesar Rp 201.876.918.000,-
 - 5735.001 Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5735.002 Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim
 - 5735.003 Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5735.004 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri
 - 5735.005 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Luar Negeri
 - 5735.006 Operasi Udara
 - 5735.007 Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral
 - 5735.008 Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 5736 Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut, sebesar Rp 2.606.775.000,-

- 5736.001 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
- 5736.002 Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut
- 5736.003 Penelitian dan Pengembangan Kamla
- 5737 Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut, sebesar Rp 9.700.000.000,-
 - 5737.001 Data dan Informasi Kamla
 - 5737.002 Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla
 - 5737.003 Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla
 - 5737.004 Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut
 - 5737.005 Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut

E. Rincian per Program dan Kegiatan serta Alokasi Anggaran

Rekapitulasi rincian anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Republik Indonesia TA 2020 per program dan kegiatan serta jenis belanja, tercantum dalam lampiran I-III.

BAB IV
PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Pada prinsipnya pengelolaan program dan anggaran mencakup seluruh fungsi manajemen meliputi perencanaan program dan anggaran, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan serta evaluasi dan rekomendasi yang diselenggarakan secara fungsional oleh unit kerja pada semua tingkatan di seluruh jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan program dan anggaran ditata dan diatur sedemikian rupa guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam usaha pencapaian sasaran yang diharapkan dengan berjalannya kelima fungsi manajemen tersebut secara baik dan tepat, sehingga segenap upaya pembinaan/pembangunan akan tercapai secara optimal.

B. Perencanaan

Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan suatu kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Program dan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disusun secara selektif dan dilaksanakan secara realistis melalui penyesuaian yang secara komprehensif dan proporsional terhadap perkembangan dinamika lingkungan strategis yang telah mempertimbangkan prediksi ancaman dan peluang, dengan tetap mengacu pada prioritas dan urgensi dalam pencapaian sasaran pembangunan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di seluruh unit kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran T.A. 2020 harus berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rancangan Renstra Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Badan Keamanan Laut T.A. 2020;
2. Berpedoman pada harga dan satuan indeks dalam bentuk Standar Biaya masukan dan keluaran, baik yang bersifat umum maupun khusus (SBU/SBK) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Transparansi dan akuntabilitas publik harus diperhatikan, sekecil apapun anggaran yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Penjabaran program dan anggaran sampai ke tingkat terendah harus tetap memperhatikan adanya sinkronisasi program dan kegiatan, terkoordinasi, aplikatif dan realistis serta berpegang teguh pada prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
5. Menghindari adanya duplikasi kegiatan dan alokasi anggaran serta untuk kegiatan administrasi harus mendukung kegiatan pokok;
6. Waspada kegiatan yang harus dikapitalisasikan sebagai aset, wajib dilaksanakan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SIMAK BMN;
7. Penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan secara cermat, teliti, terpadu dan terkoordinasi dengan mekanisme pengajuan rencana kegiatan secara garis besar sebagai berikut:
 - a. Rencana kegiatan (Rengiat) yang meliputi dokumen KAK/TOR dan RAB disusun oleh setiap pejabat Eselon II (Kepala Unit Kerja) selaku Laksgiat, kemudian diajukan kepada pejabat Eselon I (Sestama/Deputi) selaku Wasgiat dengan tembusan ke Inspektorat, dan Biro Perencanaan dan Organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan. Rengiat merupakan penjabaran rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya (t+1) yang disusun

pada tahun anggaran berjalan (t+0) dengan tujuan agar mempermudah proses pengawasan dan pengendaliannya;

- b. Asistensi rencana kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Unit Kerja dilaksanakan oleh Tim Asistensi yang melibatkan seluruh kewasgiatan dan bintek, yang mencakup kelengkapan administrasi, validitas, tingkat prioritasnya, spektek dan standar biaya; dan
- c. Rengiat yang telah diasistensi dan disetujui oleh Wasgiat akan dijadikan dasar sebagai bahan penyusunan RKA-K/L Bakamla RI.

Berdasarkan instruksi pemerintah yang berkaitan dengan penghematan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, di mana beberapa penekanan penting adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarpras kerja di lingkungan instansi masing-masing melalui:
 - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang;
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius;
 - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Penghematan penggunaan atk dan sediaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
2. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai dengan cara:
 - a. Membatasi perjalanan dinas;
 - b. Membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor; dan

- c. Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.
3. Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.

C. Pengorganisasian

Tingkatan dalam pengorganisasian program dan anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diselenggarakan dalam organisasi secara berjenjang berdasarkan tingkat fungsi, tingkat eselon I dan eselon II dengan pembagian sebagai berikut:

1. Organisasi di Tingkat Fungsi

Tingkat kementerian atau tingkat fungsi yaitu Bakamla RI dalam arti luas sebagai pengemban fungsi utama pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut. Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat fungsi terdiri dari:

- a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku Kepala Fungsi (Kafung);
- b. Pengendali dijabat oleh Sekretaris Utama dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi selaku Pengendali Fungsi (Dalfung);
- c. Pengawas dijabat oleh pejabat eselon I di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku Pengawas Fungsi (Wasfung); dan
- d. Pelaksana disebut Kepala Unit Kerja (Kauker) dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Organisasi di Tingkat Eselon I dan II

Pada tingkat eselon I dan II sebagai pengemban pelaksana fungsi program dan kegiatan, masing-masing dilaksanakan sesuai fungsi sebagai Wasfung untuk pejabat eselon I dan sebagai Kauker bagi pejabat eselon II menurut jenis program dan kegiatannya

sebagaimana tercantum dalam dokumen program dan anggaran (RKA-K/L) di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

D. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran

DIPA pada dasarnya merupakan dokumen pelimpahan wewenang otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintahan yang diterima oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA). Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA 2020 mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. Otorisasi Anggaran

- a. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara. Pejabat yang mempunyai hak dan wewenang/otorisasi atau hak menguasai, untuk mengambil tindakan-tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara disebut dengan Otorisator.
- b. Otorisator pada dasarnya merupakan Pengguna Anggaran (PA), yaitu Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran. Sebagai Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dapat melimpahkan wewenang/otorisasi kepada pejabat eselon I yang ditunjuk. Dengan demikian pejabat eselon I yang menerima pelimpahan wewenang/otorisasi dari Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

2. Pembiayaan/Penyaluran Dana dan Pembayaran

- a. Penyaluran dana/penyediaan dana dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Dasar Penyaluran Dana:
 - 1) Alokasi anggaran dan otorisasi dalam DIPA (termasuk revisinya);
 - 2) Tersedianya dana; dan
 - 3) Skala prioritas.
 - a) Prioritas Penyaluran Dana. Dana disalurkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Pemenuhan hak-hak anggota;
 - (2) Kegiatan pendidikan, operasi dan latihan; dan
 - (3) Kegiatan-kegiatan prioritas lainnya.
 - b) Penyaluran dana atas permintaan diberlakukan untuk:
 - (1) Anggaran belanja barang operasional yang dikontrakkan, pelaksanaannya disamakan dengan anggaran belanja barang non operasional dan modal; dan
 - (2) Anggaran belanja barang non operasional dan modal, disalurkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
 - (3) Penyaluran dana atas permintaan, disalurkan setelah laporan anggaran belanja modal/laporan kemajuan fisik (Lapjusik) secara berjenjang telah diterima oleh Bakamla RI dan atau dilaksanakan pada saat menjelang jatuh tempo pembayaran sesuai dengan termin pembayaran kontrak-kontrak yang sudah berjalan.

c. Prosedur Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilaksanakan dengan prosedur, sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana otomatis, dilaksanakan untuk anggaran belanja pegawai untuk hak-hak anggota khususnya gaji/tunjangan dan uang makan organik T.A. 2020 pelaksanaannya dilaksanakan oleh KPPN;
- 2) Penyaluran dana tidak otomatis, dilaksanakan apabila sudah ada otorisasi dan tersedianya dana dalam DIPA, dengan prosedur unit kerja mengajukan permintaan dana kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara;
- 3) Penyaluran dana atas permintaan. Khusus anggaran belanja barang yang pelaksanaannya disamakan dengan anggaran belanja modal, tahap proses pengendalian dana melalui prosedur sebagai berikut:
 - a) Pengajuan rencana pembiayaan (Renbia);
 - b) Laporan termin pembayaran;
 - c) Laporan situasi dana;
 - d) Permintaan dana;
 - e) Penyaluran dana; dan
 - f) Pengeluaran dana/pembayaran.
- 4) Selain prosedur pendanaan seperti tersebut di atas, penyaluran dana anggaran belanja modal sangat ditentukan oleh laporan kemajuan fisik (Lapjusik) yang ditunjukkan dengan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP). Keterlambatan pembuatan dan pengiriman lapjusik dari pelaksana kegiatan secara berjenjang ke atas akan mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana.

3. Pejabat Perbendaharaan Negara

Dalam pelaksanaan anggaran belanja negara, pengorganisasian Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- b. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang dipimpinnya. Tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara.
- c. Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, berwenang menunjuk dan menetapkan Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya; meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Penunjukan KPA oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Bakamla RI bersifat *ex-officio* dan tidak terikat periode tahun anggaran, dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada

saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

- e. KPA memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) Menyusun DIPA;
 - 2) Menetapkan PPK dan PPSPM;
 - 3) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 4) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - 6) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - 7) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 8) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - 9) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada poin 3), dapat dilimpahkan kepada KPA.
- g. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance).
- h. Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 6), dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.
- i. Mekanisme penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku PA.

- j. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penetapan PPK di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai usulan dari KPA dan ditetapkan oleh PA.
 - 2) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM dan/atau Bendahara.
- k. Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran dan dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang PPK. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
- l. PPK memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - 4) Melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - 5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - 8) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
 - 10) Menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- 11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- m. PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- n. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran (SPM).
- o. Penetapan PPSPM di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai usulan dari KPA dan ditetapkan oleh PA, PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan/atau Bendahara. Penetapan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran dan ditetapkan 1 (satu) orang PPSPM. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPSPM pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPSPM tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
- p. PPSPM memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - 2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 3) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - 4) Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - 5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan

- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- q. PPSPM bertanggung jawab terhadap:
- 1) Kebenaran administrasi;
 - 2) Kelengkapan administrasi; dan
 - 3) Keabsahan administrasi
- r. Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- 1) Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mengangkat Bendahara Pengeluaran DIPA petikan Satker Pusat, dhi Kabag Keuangan, Bakamla RI;
 - 2) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin a) dilaksanakan atas usulan KPA;
 - 3) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin b) ditetapkan dengan keputusan;
 - 4) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran;
 - 5) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
 - 6) Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku;
 - 7) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, PA/KPA menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - 8) Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada poin 7) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang

menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran; dan

- 9) KPA menyampaikan keputusan pengangkatan dan *specimen* tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada PPK dan PPSPM.
- s. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 2) Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - 3) Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah kpa;
 - 4) Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5) Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - 6) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rek. kas umum negara;
 - 7) Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - 8) Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - 9) Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - 10) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan kuasa BUN; dan
 - 11) Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
 - 12) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dan secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa BUN.
- t. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan keputusan dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan; dan
- 2) Penunjukan BPP sebagaimana dimaksud pada poin 1) dapat didelegasikan kepada KPA.

4. Perubahan Sasaran/Revisi DIPA

- a. Pada dasarnya perubahan sasaran/revisi DIPA **tidak diperbolehkan**, kecuali memang sangat mendesak dan mempunyai dasar yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan hal tersebut, dengan tujuan untuk menghindari terhambatnya atau terhentinya kegiatan atau untuk menghindari suatu resiko sosial, politik dan lain sebagainya, pergeseran program dan anggaran/perubahan sasaran/revisi DIPA dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan perubahannya.
- b. Ruang lingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian anggaran yang terdiri atas:
 - 1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya. Perubahan yang dimaksud ini terjadi pada alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari adanya beberapa hal misalnya lanjutan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerusan pinjaman, percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerusan pinjaman, perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs.
 - 2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagai akibat dari adanya hal-hal; hasil optimalisasi dari sisa anggaran satu kontrak sebesar sampai dengan 10% dari pagu anggaran, sisa anggaran swakelola, kekurangan biaya operasional, perubahan

- prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, dan atau keadaan kahar/*force majeure*.
- 3) Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi meliputi ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama, ralat kode KPPN baik dalam 1 wilayah kerja Kanwil yang sama maupun dalam wilayah kerja Kanwil yang berbeda, perubahan nomenklatur, ralat kode Satker, ralat pencantuman volume keluaran/output dalam DIPA, dan atau perubahan pejabat perbendaharaan.
 - 4) Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2020.
 - 5) Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan atau,
 - 6) Kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.
- c. Pada prinsipnya revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi *volume* keluaran/output yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar kegiatan harus dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA.
- d. Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah atau keadaan kahar yang mengakibatkan *volume* keluaran/output dalam DIPA berkurang, usul pengurangan *volume* keluaran/output diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal *volume* keluaran yang berkurang merupakan *volume* keluaran dari kegiatan prioritas nasional, usul pengurangan *volume* keluaran disampaikan kepada PA.
 - 2) Dalam hal *volume* keluaran yang berkurang selain merupakan *volume* keluaran dari kegiatan prioritas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, usul pengurangan

volume keluaran disampaikan kepada Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program.

- e. Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran antar program harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR-RI.
- f. Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran antar *volume* keluaran dan antar kegiatan memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- g. Revisi anggaran yang menjadi kewenangan KPA merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, meliputi:
 - 1) Pergeseran dalam 1 keluaran/output, 1 kegiatan dan 1 satker; dan
 - 2) Pergeseran antar keluaran/output, 1 kegiatan dan 1 satker.
- h. Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran/revisi DIPA ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 4 Oktober 2020, untuk revisi anggaran Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - 2) Tanggal 25 Oktober 2020 untuk revisi anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik dengan perubahan RKA-K/L maupun tanpa perubahan RKA-K/L.
- i. Revisi DIPA diajukan secara berjenjang kepada PA/KPA u.p. Karo Perencanaan dan Organisasi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran sampai dengan pelaporannya, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian program dan anggaran, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai penyelenggaraan program dan anggaran dan atau laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di segala tingkatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam hal ini, Inspektorat sebagai APIP bertindak sebagai *leading sector* dengan melaksanakan fungsi *consulting and assurance* terhadap kualitas pencapaian kinerja.
- b. Seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di segala tingkatan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern badan keamanan laut Republik Indonesia yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.
- c. Seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di segala tingkatan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.

- d. Untuk memperkuat dan menunjang SPIP yang dimaksud, dilakukan:
- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, yaitu Inspektorat (APIP); dan
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.
- e. Pejabat yang secara fungsional menjabat pengendalian program/kegiatan (Dalgiat) pada tingkat unit kerja (eselon II), mengoordinasikan kegiatannya kepada para pengawas kegiatan (Wasgiat), untuk dapat mengambil langkah-langkah tindak koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, meneliti dan menganalisa laporan program dan anggaran.
- f. Sarana yang diperlukan dalam pengendalian program dan anggaran, antara lain:
- 1) Dokumen perencanaan telah ditetapkan dalam SPP Pertahanan Negara, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), DIPA, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA), Program Kerja (Progja), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) dan rencana penarikan dana (*disbursement plan*) dari masing-masing fungsi pelaksana;
 - 2) Dokumen otorisasi, dan dokumen penyaluran dana SPP, SPM dan SP2D;
 - 3) Laporan yang meliputi laporan kemajuan (*progress report*) fisik serta laporan yang terkait dengan anggaran dan keuangan, untuk selanjutnya pada akhir kegiatan diadakan evaluasi; dan
 - 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pengendalian dilaksanakan secara pasif (melalui penelitian administrasi) maupun aktif (melalui peninjauan fisik di lapangan), dengan sasaran:
- 1) Terwujudnya kesinambungan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - 2) Terselenggaranya kegiatan seluruh fungsi secara terpadu dan serasi guna tercapainya seluruh sasaran; dan
 - 3) Tercapainya keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan dengan penyaluran anggaran maupun dukungan dana sesuai pentahapannya.
- h. Pengendalian dilaksanakan menggunakan metode, prinsip dan asas, sebagai berikut:
- 1) Metode.
 - a) Pengarahan, meliputi kegiatan memberikan arahan dalam perencanaan program dan anggaran serta pembiayaan agar mengacu pada pendekatan anggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - b) Pemantauan, meliputi kegiatan mempelajari, menelaah dan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari semua aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan;
 - c) Kunjungan staf, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dari suatu proses perencanaan serta informasi lain yang tidak dapat dilaporkan tertulis sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh staf perencana; dan
 - d) Analisa dan evaluasi, untuk memberikan masukan dalam rangka menetapkan, memperhitungkan dan menyempurnakan pelaksanaan program dan anggaran pada tahap selanjutnya.

2) Prinsip-prinsip.

- a) Mengutamakan preventif di atas represif, berarti sistem pengendalian intern diutamakan dan diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan daripada penindakan setelah terjadi penyimpangan;
- b) Peran serta, berarti sistem pengendalian intern mengikutsertakan semua pihak untuk bertanggung jawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan, instruksi serta ketentuan yang berlaku;
- c) Keadilan, berarti setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi hukum harus didasarkan pada obyektivitas, kecermatan, ketelitian dan kebenaran agar tercapai kepastian hukum sehingga dapat menjamin rasa aman dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang; dan,
- d) Membimbing dan mendidik, berarti dalam melaksanakan sistem pengendalian intern agar bersifat membimbing serta memberi petunjuk dalam mengambil tindakan bersifat mendidik.

3) Asas-asas

- a) Manfaat, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian intern harus dapat bermanfaat untuk kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b) Transparan, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan secara transparan terhadap seluruh kegiatan dengan melibatkan semua bagian mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c) Efektif, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

- dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- d) Efisien, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan menggunakan daya dan dana yang sesuai untuk mencapai sasaran yang diharapkan; dan,
 - e) Akuntabel, pelaksanaan sistem pengendalian intern harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.
- i. Pengendalian Pembayaran. PPSPM dan Bendahara sebelum membayar terlebih dahulu **harus** mengadakan pengujian atas kebenaran dokumen tagihan.
- 1) Setiap dokumen tagihan harus memenuhi persyaratan:
 - a) *Wetmatigheid* merupakan salah satu syarat sahnya suatu tagihan/pembayaran yang mempunyai dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) *Rechtmatigheid* merupakan salah satu syarat sahnya suatu tagihan/pembayaran yang menyatakan bahwa hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah dilaksanakan oleh yang berhak atas tagihan tersebut sesuai batas wewenang dan hak yang diperoleh;
 - c) *Doelmatigheid* merupakan salah satu syarat sahnya suatu tagihan/pembayaran yaitu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - d) *Cijfermatigheid* merupakan salah satu syarat sahnya suatu tagihan/pembayaran yang sesuai dengan angka-angka baik dari segi "Aritmatic" (kali, bagi, tambah, kurang dan jumlah) ataupun pembebanan kode akun yang benar.

- 2) Dokumen Tagihan (Doktag) yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibayarkan dan Bendahara wajib memberitahukan kepada pihak terkait untuk melengkapi. Pembayaran dapat dilaksanakan setelah syarat kelengkapan dipenuhi.
- 3) Kewenangan PPSPM dan Bendahara dalam hal pengujian terkait syarat sahnya suatu dokumen tagihan terhadap kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pada program yang telah direncanakan, sebatas pada aspek administrasi, untuk fisik tetap menjadi tanggung jawab PPK.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan guna menjamin pencapaian sasaran program dan anggaran secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi komando dari setiap atasan.
- b. Setiap atasan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- c. Pengawasan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh pejabat fungsional sesuai bidangnya, dengan cara memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, mengawasi kelancaran pelaksanaannya agar keluaran/*output* tercapai sesuai perencanaan baik kuantitas maupun kualitas serta mengambil langkah-langkah koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, meneliti dan menganalisa setiap laporan kemajuan administrasi dan fisik.
- d. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai kewenangannya, yang dibiayai dengan APBN.

- e. Pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat dilaksanakan secara intensif dan obyektif sesuai kondisi riil di lapangan, dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan bertanggung jawab.
- f. Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan internal serta kegiatan tertentu (atas perintah pemimpin) di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai batas kewenangannya, dengan cara:
 - 1) Melaksanakan *review* atas penyusunan RKA-K/L maupun perubahan atau revisi anggaran DIPA dan pengelolaan keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebelum disahkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Review* atas laporan keuangan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran berjalan, yaitu terhadap laporan keuangan semester I dan laporan keuangan akhir tahun anggaran;
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) terhadap kinerja dan perbendaharaan di seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (sesuai batas kewenangannya) sesuai dengan program kerja dan anggaran yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan pengamatan dan/atau pemantauan atas pelaksanaan dan/atau kemajuan suatu program/kegiatan sepanjang tahun anggaran serta tindak lanjut hasil wasrik (baik internal maupun eksternal); dan
 - 4) Melaksanakan pengawasan lainnya, antara lain berupa: uji petik, pemutakhiran data, kunjungan kerja, evaluasi, sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.

F. Lain-lain**a. Pengadaan Barang/Jasa.**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut.
- 2) Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Dalam hal ini PPK juga bertindak sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat).
- 5) Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 6) Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 7) Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 8) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas

memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 9) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.
- 11) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, dengan ketentuan:
 - a) Berupa Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilihan Penyedia;
 - b) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa
- 12) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L.

- 13) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan meliputi PA/KPA dan PPK.
- 14) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, yang terdiri dari biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada harga barang, biaya pengiriman, biaya suku cadang dan purna jual, biaya personil, biaya material/bahan, biaya peralatan, biaya pemasangan, dan/atau biaya sewa
 - b) Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi dan/atau biaya lainnya.
 - c) Biaya administrasi terdiri dari:
 - (1) Biaya pengumuman;
 - (2) Biaya survei lapangan
 - (3) Biaya survei pasar;
 - (4) Honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau
 - (5) Biaya penggandaan dokumen;
 - d) Biaya administrasi dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

- 15) Pelaksanaan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek T.A. 2020 dan kegiatan melalui otorisasi PA/KPA, dengan ketentuan :
- a) **Tidak diperbolehkan** melaksanakan kegiatan yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA dan/atau RKA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
 - b) Usulan kegiatan yang telah masuk dalam RKA berdasarkan alokasi anggaran T.A. 2020 dan pelaksanaannya diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) bulan, agar menerapkan langkah-langkah percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan/proyek.
 - c) Untuk kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA/RKA tidak boleh dilaksanakan sebelum ada otorisasi, kecuali untuk mendukung kegiatan yang apabila dilaksanakan sesuai jadwal diperkirakan penyelesaiannya akan melewati batas waktu tahun anggaran berjalan, mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, mendukung kegiatan operasi dan latihan, mendukung kegiatan mendesak dan/atau kegiatan darurat, dengan cara mengajukan surat permohonan melaksanakan kegiatan mendahului otorisasi (SPMO) sesuai dengan prosedur.
 - d) Kegiatan dapat dikatakan darurat apabila memenuhi kriteria antara lain, untuk mendukung kegiatan operasi dan/ atau kegiatan lain sesuai kebijakan pemimpin yang harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda.
- 16) Pengecekan fisik terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan termasuk pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan harus selalu dilaksanakan oleh pejabat terkait.

- 17) KPA dan/atau PPK wajib melaporkan data BMN setiap kali terjadi perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada satuan kerja/badan/unit akuntansi yang berwenang melakukan pencatatan atas perubahan BMN (petugas SIMAK BMN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 18) Pengadaan barang/jasa harus memprioritaskan produk industri pertahanan dalam negeri dan/atau peralatan yang terintegrasi antar matra/lintas sektoral.

b. Penatabukuan

Penatabukuan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sistem penatabukuan dan pelaporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi komputerisasi agar penatabukuan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.

c. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (LRAN) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan pertanggungjawaban Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Penyusunan LRAN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dilaksanakan oleh Biro Umum c.q. Bagian Keuangan serta dibantu badan-badan lain yang menangani penganggaran.
- 2) Sumber data LRAN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah:
 - a) RKA-KL/DIPA/PPPA/Progja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 beserta perubahan-perubahannya;

- b) Realisasi pelaksanaan anggaran (beban murni) yang diperoleh dari data pembukuan dihimpun secara berjenjang dari setiap unit kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; dan
- 3) LRAN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disusun berdasarkan surat Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap tahun anggaran.
- 4) LRAN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ditandatangani Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai waktu yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Triwulan I paling lambat tanggal 30 April 2020;
 - b) Semester I paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
 - c) Triwulan III paling lambat tanggal 30 Oktober 2020; dan
 - d) Akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

d. Pelaporan

Tata cara pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang telah diatur di lingkungan Kementerian dan Lembaga.

e. Panitia Anggaran

- 1) Pada tiap eselon I yang mengelola program dan anggaran dibentuk Panitia Anggaran yang ditetapkan dengan suatu surat perintah.
- 2) Tugas Panitia Anggaran (Pangar) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia:
 - a) Memberi petunjuk perencanaan anggaran kepada pelaksana program dan anggaran di tingkat eselon II dibawahnya;

- b) Meneliti serta menghimpun rencana program dan anggaran belanja yang disusun oleh badan-badan pelaksana program dan anggaran; dan
- c) Menyusun/menyiapkan sumbangan RKA-KL Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai dengan pedoman pengarahan yang ditetapkan oleh pemimpin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

f. Kegiatan Lintas Tahun

- 1) Kegiatan pengadaan barang/jasa dengan kontrak tahun tunggal, pada dasarnya harus dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, namun karena kendala waktu dan/atau teknis menyebabkan masih ada kegiatan kontrak pengadaan barang/jasa yang penyelesaiannya terpaksa melewati tahun anggaran.
- 2) Penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa tersebut di atas harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta dapat mewujudkan tertib administrasi, tertib tindak dan tertib hukum antara lain menghindari terjadinya pemalsuan dokumen, meminimalkan potensi pelanggaran hukum yang bersifat pidana, meminimalkan atau meniadakan potensi terjadinya kerugian Negara.
- 3) Ketentuan kegiatan kontrak tahun tunggal yang penyelesaiannya dapat melewati tahun, proses pemilihan penyedia barang/jasa, pembuatan kontrak, ketentuan pembayaran kontrak dan pencairan jaminan bank serta pelaporan kegiatan lintas tahun mengacu kepada **Peraturan Menteri Keuangan No 243 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran mengenai ketentuan pengelolaan kontrak tahun tunggal yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan

BAB V

PENUTUP

1. Penekanan

- a. Pahami, tindak lanjuti dan jabarkan PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 ke dalam program kerja dan anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Laksanakan langkah-langkah perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran TA. 2020.
- c. Tingkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (*value for money*) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah, yaitu dengan tidak adanya pelaksanaan rapat dalam kantor di luar jam kerja (RDK), pembatasan perjalanan dinas, konsinyering dan honor tim.
- d. Laksanakan kegiatan TA. 2020 sesuai dengan rencana kerja, dan pastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi belanjanya.
- e. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan program dan anggaran, sesuai fungsi dan kewenangannya wajib melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait, sehingga dapat dicapai sinergitas dan langkah tindak yang komprehensif sesuai dengan yang diharapkan.
- f. Jaga integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan anggaran sesuai yang telah direncanakan dalam PPPA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 serta hindari terjadinya revisi kegiatan yang berdampak pada revisi anggaran kecuali bila terjadi keadaan kahar dan/atau kebijakan pemerintah.
- g. Tidak dibenarkan upaya pemanfaatan sisa anggaran (optimalisasi) dari akumulasi kontrak-kontrak yang telah dibayarkan, terutama bila target sasaran atau output telah tercapai sesuai perencanaan. Satker yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun

anggaran berjalan (TAB) dapat menggunakan hasil optimalisasi tersebut dalam penetapan alokasi anggaran pada dua tahun anggaran berikutnya setelah Laporan Keuangan TAB tersebut berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan opini BPK, yang selanjutnya disebut sebagai penghargaan/reward sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 158/PMK.02/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

- h. Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran untuk anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Satker, agar dimanfaatkan secara optimal mekanisme pendanaan melalui pengajuan Uang Persediaan (UP) ke KPPN sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku Dalam melaksanakan revisi anggaran dengan KPPN setempat, agar hasil pelaksanaan revisi anggaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan disertai revisi ADK.
- i. Laksanakan pencatatan secara tertib terhadap penambahan aset dari hasil pengadaan barang/jasa baik yang didukung dari anggaran belanja modal maupun belanja barang, hibah dan lain-lain serta perubahan tambah/kurang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku mengenai SIMAK BMN.
- j. Laporan pelaksanaan program dan anggaran wajib disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan tepat waktu.
- k. Para Pejabat Struktural Eselon I selaku Pembina Teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, wajib membuat laporan kinerja rutin sebagai satker dan sebagai pembina teknis (penanggung jawab kegiatan sesuai kebintekannya). Laporan kinerja tersebut minimal harus dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan yang dilaksanakan, target dan sasaran yang ingin dicapai serta alokasi anggarannya;
 - 2) Pencapaian target dan sasaran kegiatan (baik dari sisi *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil);

- 3) Kendala/permasalahan yang ada serta solusi pemecahan yang telah diberikan dan telah dilaksanakan;
 - 4) Resiko yang mungkin terjadi dan yang telah terjadi; dan
 - 5) Sinkronisasi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas sasaran kebijakan pembinaan/pembangunan kemampuan dan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
1. Setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan program dan anggaran apabila melaksanakan serah terima jabatan, wajib mencantumkan seluruh permasalahan dan tindak lanjut yang belum/sedang/sudah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan tersebut dalam memorandum serah terima jabatan.
 - m. Pengajuan kebutuhan dan/atau anggaran dilaksanakan sesuai kebijakan "*one gate policy*" (seluruh pengajuan harus melalui satu pintu, yaitu Sekretaris Utama Bakamla RI dhi. Biro Perencanaan dan Organisasi).
 - n. Harga-harga yang tercantum dalam PPPA ini merupakan dasar perencanaan untuk menghitung anggaran dan bukan merupakan persetujuan harga per unit barang/pekerjaan. Harga per unit barang/pekerjaan ditentukan pada proses pengadaan barang/pekerjaan, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

LAMPIRAN I A
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN
 KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TA. 2020

**REKAP ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER JENIS BELANJA
 DIPAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	PROGRAM	JENIS BELANJA			JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI (51)	BELANJA BARANG (52)	BELANJA MODAL (53)	
1	2	3	4	5	6
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	60.216.558.000	103.310.095.000	187.762.727.000	351.289.380.000
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut		214.183.693.000		214.183.693.000
	TOTAL	60.216.558.000	317.493.788.000	187.762.727.000	565.473.073.000

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
 Laksamana Madya TNI

**REKAP ALOKASI ANGGARAN OPERASIONAL (KOMPONEN 001, 002 DAN 005)
 DI PA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	VOLUME	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
119.01.01	<i>Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla</i>		351.289.380.000	
5734	<i>Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla</i>		147.064.646.000	
5734.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1 Layanan	132.437.961.000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>	1 Layanan	60.216.558.000	
511111	Beban Gaji Pokok PNS		18.974.680.000	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS		434.000	
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS		1.040.942.000	
511122	Beban Tunj. Anak PNS		264.964.000	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS		2.958.760.000	
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS		50.400.000	
511125	Beban Tunj. PPh PNS		45.654.000	
511126	Beban Tunj. Beras PNS		1.211.588.000	
511129	Beban Uang Makan PNS		6.219.576.000	
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS		4.550.000	
511151	Beban Tunjangan Umum PNS		1.221.640.000	
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		28.223.370.000	

002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	39.334.103.000
A	Kebutuhan Dinas Pegawai (Pakaian Dinas Pegawai/Kapor ABK	1 Layanan	9.859.094.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		9.859.094.000
B	Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat	1 Layanan	2.529.500.000
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.529.500.000
C	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1 Layanan	3.456.990.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		3.456.990.000
D	Pemeliharaan Sarana Kantor	1 Layanan	1.491.172.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.491.172.000
E	Langganan Daya dan Jasa	1 Layanan	5.094.000.000
522111	Belanja Langganan Listrik		4.206.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon		321.600.000
522113	Belanja Langganan Air		566.400.000
F	Jasa Pos dan Giro	1 Layanan	378.000.000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		378.000.000
G	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1 Layanan	5.019.360.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		4.369.014.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		650.346.000
H	Perjalanan Dinas Rutin	1 Layanan	3.247.016.000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1.864.800.000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		216.000.000
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri		1.116.216.000
521219	Beban Non Operasional Lainnya		50.000.000
I	Sewa Rumah Jabatan Kabakamla	1 Layanan	1.700.000.000
522141	Belanja Sewa		1.700.000.000
J	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Barat	1 Layanan	200.000.000
522141	Belanja Sewa		200.000.000
K	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Tengah	1 Layanan	180.000.000
522141	Belanja Sewa		180.000.000
L	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Timur	1 Layanan	150.000.000

522141	Belanja Sewa				150.000.000
M	Perjalanan Dinas Pimpinan			1 Layanan	2.520.576.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				945.920.000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri				1.554.656.000
521219	Beban Non Operasional Lainnya				20.000.000
N	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/ Dermaga Zona Maritim Barat			1 Layanan	222.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				222.000.000
O	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/ Dermaga Zona Maritim Tengah			1 Layanan	189.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				189.000.000
P	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/ Dermaga Zona Maritim Timur			1 Layanan	189.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				189.000.000
Q	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Barat			1 Layanan	318.384.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				318.384.000
R	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Tengah			1 Layanan	354.384.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				354.384.000
S	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Timur			1 Layanan	390.384.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				390.384.000
T	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Barat			1 Layanan	146.885.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				146.885.000
U	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Tengah			1 Layanan	116.495.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				116.495.000
V	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Timur			1 Layanan	116.495.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				116.495.000
W	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Barat			1 Layanan	12.000.000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				12.000.000
X	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Tengah			1 Layanan	12.000.000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				12.000.000
Y	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Timur			1 Layanan	12.000.000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				12.000.000
Z	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Barat			1 Layanan	476.836.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				476.836.000
AA	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Tengah			1 Layanan	419.305.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				419.305.000
AB	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Timur			1 Layanan	533.227.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				533.227.000

005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Layanan	32.887.300.000
A	Pemeliharaan dan Operasional Sarana Prasarana Kamla	1 Layanan	21.764.500.000
521213	Honor Output Kegiatan		15.850.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		18.748.650.000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		3.000.000.000
B	Pemeliharaan dan Operasional SPKKL/GS Kamla	1 Layanan	2.109.400.000
521213	Honor Output Kegiatan		11.400.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2.098.000.000
C	Pemeliharaan Alat Komunikasi	1 Layanan	500.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		500.000.000
D	Pemeliharaan Peralatan PIM	1 Layanan	750.000.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		750.000.000
E	Pemeliharaan Data Center	1 Layanan	1.002.000.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.002.000.000
F	Pemeliharaan Jaringan	1 Layanan	400.000.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		400.000.000
G	Layanan Broadband Data dan Informasi	1 Layanan	6.309.200.000
521213	Honor Output Kegiatan		11.400.000
522141	Belanja Sewa		6.297.800.000
I	Langganan Lisensi	1 Layanan	52.200.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		52.200.000

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN
 KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TA. 2020

**REKAP ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
119	Badan Keamanan Laut	565.473.073.000	
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	351.289.380.000	
3967	<u>Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla</u>	201.043.122.000	
3967.001	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	154.653.126.000	
3967.002	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	12.904.270.000	
3967.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	32.758.726.000	
3967.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	727.000.000	
3968	<u>Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi</u>	2.303.707.000	
3968.952	Layanan Perencanaan	716.763.000	
3968.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	720.000.000	
3968.960	Layanan Manajemen Organisasi	866.944.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH	KETERANGAN
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla	877.905.000	
3969.965	Layanan Audit Internal	877.905.000	
5734	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	147.064.646.000	
5734.954	Layanan Manajemen SDM	9.213.658.000	
5734.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.590.510.000	
5734.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1.147.478.000	
5734.959	Layanan Protokol	125.664.000	
5734.962	Layanan Umum	2.549.375.000	
5734.994	Layanan Perkantoran	132.437.961.000	
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	214.183.693.000	
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut	201.876.918.000	
5735.001	Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	103.000.000	
5735.002	Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim	134.648.000	
5735.003	Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	310.907.000	
5735.004	Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri	170.006.810.000	
5735.006	Operasi Udara	26.939.235.000	
5735.008	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	4.382.318.000	
5736	Penyusunan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut	2.606.775.000	
5736.001	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	1.100.000.000	
5736.002	Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut	406.775.000	
5736.003	Penelitian dan Pengembangan Kamla	1.100.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH	KETERANGAN
5737	<u>Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut</u>	9.700.000.000	
5737.001	Data dan Informasi Kamla	1.900.000.000	
5737.002	Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla	1.700.000.000	
5737.003	Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla	3.000.000.000	
5737.004	Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut	3.000.000.000	
5737.005	Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut	100.000.000	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DI PA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : BIRO SARANA DAN PRASARANA

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla			351.289.380.000							
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla			201.043.122.000							
3967.001	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	349	Pucuk	154.653.126.000							
3967.001.015	PENGADAAN SENJATA 30 MM			119.040.000.000							
007	Peralatan dan Mesin			119.040.000.000							
A	PENGADAAN SENJATA 30 MM	4	Pucuk	119.040.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDJANSYAH, S.T.	TW I-IV	
3967.001.016	PENGADAAN SENJATA 12,7 MM			12.760.000.000							
007	Peralatan dan Mesin			12.760.000.000							
A	PENGADAAN SENJATA 12,7 MM	20	Pucuk	12.760.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDJANSYAH, S.T.	TW I-IV	
3967.001.017	PENGADAAN SENJATA PERORANGAN			17.122.500.000							
007	Peralatan dan Mesin			17.122.500.000							
A	PENGADAAN SENJATA PERORANGAN			17.122.500.000					- M. YUSUF, S.H. - HARDJANSYAH, S.T.	TW I-IV	

KODE	URAIAN	VOL SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WASGIAT	FPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN FPK	TW	KET
	- PENGADAAN SENAPAN	235 Pucuk	16.097.500.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS			
	- PENGADAAN SENJATA GENGAM/PISTOL	50 Pucuk	1.025.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS			
3967.001.018	PENGADAAN SUBMACHINE GUN		2.419.626.000							
007	Peralatan dan Mesin		2.419.626.000							
A	PENGADAAN SUBMACHINE GUN	30 Pucuk	2.419.626.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
3967.001.019	PENGADAAN SENJATA SNIPER		3.311.000.000							
007	Peralatan dan Mesin		3.311.000.000							
A	PENGADAAN SENJATA SNIPER	10 Pucuk	3.311.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
3967.002	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut	1 Paket	12.904.270.000							
3967.002.001	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Kamajala		12.904.270.000							
007	Peralatan dan Mesin		12.904.270.000							
A	PENGADAAN AMUNISI	1 Paket	12.904.270.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
3967.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	32.758.726.000							
007	Peralatan dan Mesin		25.000.000.000							
A	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kamla 2 Unit Kapal 48 Meter	1 Paket	15.000.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
B	Pengadaan Kapasit Special Response Team / HSC	1 Paket	10.000.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		3.830.000.000							

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
A	Pembelian Data AIS Satelit	1	Paket	3.830.000.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			249.000.000							
A	PENGADAAN SOFA RUANG TAMU KABAKAMLA	1	Paket	199.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T. / KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI		
B	PENGADAAN PERALATAN VICON RUANG KABAKAMLA	1	Paket	50.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T. / KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI		
054	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan			3.679.726.000							
A	Renovasi Basement Gedung Proklamasi	1	Paket	1.500.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T. / KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
B	Renovasi Lantai 6 Gedung Mabes Bakamla	1	Paket	2.179.726.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T. / KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
3967.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1	Layanan	727.000.000							
051	Penatausahaan BMN			82.565.000							
A	Layanan Pengelolaan BMN	12	Bulan	38.440.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E. / KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
B	Layanan Pengelolaan BMN pada Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB)			18.000.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E. / KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
C	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 2022			10.660.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E. / KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
D	Penyusunan Kebijakan Akuntansi BMN Pencatatan Aset			10.830.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E. / KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
E	Penyusunan Kebijakan Akuntansi BMN Pelaksanaan Inventarisasi BMN Di Saat Pandemi COVID 19			4.635.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E. / KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
054	Penghapusan BMN			189.492.000							

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
A	Penghapusan BMN	9	Keg	189.492.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
055	Monitoring BMN			154.943.000							
A	Inventarisasi Barang Milik Negara di Kantor Pusat	1	Keg	3.036.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I	
B	Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Barang Milik Negara di Daerah	3	Keg	151.907.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
058	Distribusi dan Pemeliharaan			170.426.000							
A	Pengecekan Kapal KN	14	Keg	150.418.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
B	Pengawasan Pekerjaan Pengadaan KAPSAT HSC			20.008.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
059	Logistik			129.574.000							
A	Penyusunan Rencana Logistik Sarana dan Prasarana	14	Keg	129.574.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./ KARO SARPRAS	- M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I - II	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla			372.164.708.000							
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi			2.303.707.000							
3968.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan	716.763.000							
051	Penyusunan Rencana Program			442.912.000							
A	Rapat Kerja Program Bakamla	1	Keg	224.562.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I	
B	Rapat Internal/Eksternal	12	Bulan	64.450.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
C	Sosialisasi Program dan Anggaran	3	Keg	116.550.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW III	
D	Penyusunan Rencana Kerja	2	Keg	37.350.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
052	Penyusunan Rencana Anggaran			273.851.000							
A	Bimtek Perencanaan dan Anggaran Unit Kerja	1	Keg	49.901.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW II	
B	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	15	Keg	104.375.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
C	Rapat Dengar Pendapat	6	Keg	52.350.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
D	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TA. 2020	1	Keg	67.225.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW IV	
3968.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	720.000.000							
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			240.000.000							
A	Konsinyering Pelaksanaan Monitoring Program dan Anggaran	1	Keg	65.740.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-II	
B	Rapat Internal	12	Bulan	138.240.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
D	Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Bakamla TA. 2019 melalui Aplikasi E-Monev	4	Keg	36.020.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	
052	Pelaksanaan Manajemen Kinerja			240.000.000							
A	Penerapan Pengukuran Kinerja	4	Keg	92.552.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E.,M.Pd.	TW I-IV	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
B	Rakor Manajemen Kinerja	16	Keg	90.112.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
C	Bimtek SDM Pengelola Akuntabilitas	1	Keg	32.996.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I	
E	Asesment Kegiatan	2	Keg	24.340.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW II-III	
053	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja			240.000.000							
A	Rapat Rekonsiliasi Laporan Kinerja (Internal Bakamla)	12	Keg	51.340.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
B	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Bakamla RI	4	Keg	48.660.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
C	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Bakamla RI	1	Keg	50.220.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I	
D	Pencetakan LKj Triwulan dan Tahunan Bakamla RI	1	Keg	66.500.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
E	Rapat Koordinasi Pelaporan Eksternal	6	Keg	23.280.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
3968.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan	866.944.000							
051	Tata Laksana Organisasi/Kelembagaan			452.954.000							
A	Penataan Organisasi	3	Keg	105.460.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
B	Analisis Jabatan	4	Keg	81.680.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-II	
C	Rapat Internal	12	Bulan	72.840.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
D	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Keg	192.974.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
052	Pengelolaan Kelembagaan			223.830.000							
A	Rapat Tata Laksana	10	Keg	72.655.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
B	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5	Keg	137.275.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW II-III	
C	Rapat Internal	5	Keg	13.900.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
053	Peraturan Internal			190.160.000							
A	Penyusunan Peraturan Badan/Kepala dan Keputusan (Lingkup Internal)	7	Keg	144.620.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	
B	Rapat Harmonisasi Peraturan di Kantor Gd. Proklamasi Bakamla	2	Keg	45.540.000	KARO REN & ORG	SESTAMA & KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HANARKO DJODI PAMUNGKAS/ KARO REN & ORG	- MURNIYATI NINGSIH, S.E. - ARI SUPRIHATIN, S.E., M.Pd.	TW I-IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,




**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla			372.154.708.000							
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla			877.905.000							
3969.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan	877.905.000							
051	Pelaksanaan Audit Internal			471.756.000							
A	Audit Program Sumber Daya dan Keuangan Triwulan I, II, III dan IV	16	Keg	416.556.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW I-IV	
B	Pelaksanaan Probitly Audit Pengadaan Barang dan Jasa	2	Keg	32.800.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-III	
C	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	2	Keg	22.400.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-III	
052	Reviu Perencanaan Anggaran			27.505.000							
A	Rapat Reviu Perencanaan Anggaran	4	Keg	27.505.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-III	
053	Tindak Lanjut Hasil LHP			183.569.000							
A	Monitoring Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	4	Keg	183.569.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW I-IV	
054	Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan			195.075.000							
A	Pelaksanaan Satgas Saber Pungli	4	Keg	8.261.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-IV	
B	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP	2	Keg	23.700.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-IV	
C	Penyelenggaraan SPIP	2	Keg	86.786.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW I-IV	
D	Reviu Laporan Kinerja Instern Pemerintah (LAKIP)	1	Keg	8.335.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/ INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW I	

E	Revisi Laporan Keuangan	2	Keg	31.835.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW I-III
F	Dokumentasi Reformasi Birokrasi	1	Keg	36.158.000	INSPEKTUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	MULYONO/INSPEKTUR	- WAHYU WIBOWO, S.E. - APRILIDIA, S.E.	TW II-IV

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,


Aan Kurrida, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DI PA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : BIRO UMUM

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKEGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KEF
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla			372.154.708.000							
5734	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla			147.064.646.000							
5734.954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Layanan	9.213.658.000							
051	Pengembangan Pegawai			5.904.265.000							
A	Diklat Pimpinan/Struktural	15	Org	445.600.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II-III	
B	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM	47	Org	671.540.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II-III	
C	Beasiswa Pendidikan S2/S3 Dalam Negeri-Luar Negeri	17	Org	371.600.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
D	Latihan Dasar Militer CPNS Bakamla	90	Org	3.074.361.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II	
E	Tunggakan Beasiswa Luar Negeri T.A. 2019	2	Org	62.680.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW IV	
F	Latihan Dasar Militer PNS Bakamla Angkatan 2019	88	Org	1.278.484.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW IV	
052	Penempatan Pegawai			2.623.550.000							
A	Rotasi Pegawai	1	Keg	502.964.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II & IV	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KBT
B	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	2	Keg	148.964.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II, III, & IV	
C	Seleksi Terbuka Jabatan Pengawas	2	Keg	147.603.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I & III	
D	Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Jabatan (Bapejaka)	4	Keg	11.072.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II & IV	
E	Rekrutmen Calon Pegawai Nedgeri Sipil Tahun 2019	1	Keg	832.881.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
F	Rekrutmen Calon Pegawai Nedgeri Sipil Tahun 2020	1	Keg	980.066.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
053	Administrasi Kepegawaian			685.843.000							
A	Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Tes Narkoba	1	Keg	228.043.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW III	
B	Pembinaan Mental Personel	2	Keg	81.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
C	Pembinaan Jasmani Personel	12	Bln	261.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
D	Pelantikan Pejabat Struktural	4	Keg	108.600.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II & IV	
F	Koordinasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Pegawai	12	Bln	7.200.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I & IV	
5734.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	1.590.510.000							
051	Tata Laksana Keuangan			148.200.000							
A	Verifikasi dokumen anggaran dan keuangan Sekretariat Utama	12	Bln	148.200.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
052	Pengelolaan Perbendaharaan			1.290.000.000							

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KEF
A	Penatausahaan Keuangan	12	Bln	1.290.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
053	Penyusunan Laporan Keuangan			152.310.000							
A	Penyusunan Instrumen Laporan Keuangan	12	Keg	48.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
B	Rekonsiliasi SAK dan BMN	12	Keg	69.900.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
C	Bimbingan Teknis Petugas Penyusunan Laporan Keuangan	3	Keg	34.410.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I	
5734.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	1.147.478.000							
051	Hubungan Masyarakat			1.147.478.000							
A	Dokumentasi Kegiatan Kamla	6	Bln	44.700.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
B	Materi Penyebaran Informasi Kamla	1	Pkt	651.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
D	Penyusunan Majalah Bakamla	2	Edisi	45.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II & IV	
E	Webette Bakamla	12	Bln	72.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
F	Publikasi Kinerja Bakamla	2	Keg	232.038.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
G	Peliputan Kegiatan	12	Keg	102.740.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
5734.959	Layanan Protokol	1	Layanan	125.664.000							
051	Pelaksanaan Keprotokol			125.664.000							
A	Dukungan Administrasi	12	Bln	13.300.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
B	Koordinasi Stakeholder/Perjalanan Pendampingan Pimpinan	5	Dirh	112.364.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
5734.962	Layanan Umum	1	Layanan	2.549.375.000							
051	Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga			418.200.000							
A	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	12	Bln	342.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
B	Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Kantor	12	Bln	72.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
C	Rapat Internal/Eksternal	12	Bln	4.200.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
052	Pengelolaan Arsip dan Persuratan			60.000.000							
A	Bahan Penunjang Kearsipan	12	Bln	60.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
053	Pengelolaan Layanan Kesehatan			2.040.175.000							
A	Persediaan Obat Obat	12	Bln	330.000.000							
	- Persediaan Obat-obatan Klinik Pusat	12	Bln	150.000.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR			TW I-IV	
	- Persediaan Obat-obatan Klinik Zona Barat	12	Bln	60.000.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR			TW I-IV	
	- Persediaan Obat-obatan Klinik Zona Tengah	12	Bln	60.000.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
	- Persediaan Obat-obatan Klinik Zona Timur	12	Bln	60.000.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR			TW I-IV	
B	Penanganan Covid-19	1	Paket	1.710.175.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR				
054	Pengelolaan Layanan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan			31.000.000							
A	Kelengkapan Keamanan dan Ketertiban Kantor	4	Keg	12.580.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW II	
B	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kantor	12	Bln	18.420.000	KARO UMUM	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
5734.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	132.437.961.000							
001	Caji dan Tunjangan			60.216.558.000							

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LARGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMTN PPK	TW	KET
A	Pembayaran Geji dan Tunjangan	12	Bln	60.216.558.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			39.334.103.000							
A	Kebutuhan Dinas Pegawai (Pakaian Dinas Pegawai/Kapor ABK KN/Satpam/Pengemudi/Pramubhakti dan Piket Jaga)	12	Bln	9.859.094.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
B	Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat	12	Bln	2.529.500.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
C	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12	Bln	3.456.990.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
D	Pemeliharaan Sarana Kantor	12	Bln	1.491.172.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
E	Langganan Daya dan Jasa	12	Bln	5.094.000.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
F	Jasa Pos dan Giro	12	Bln	378.000.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
G	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	12	Bln	5.019.360.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
H	Perjalanan Dinas Rutin	12	Bln	3.247.016.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
I	Sewa Rumah Jabatan Kabakamla	12	Bln	1.700.000.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	
J	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Barat	12	Bln	200.000.000	KAZONA BARAT	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/ KAZONA BARAT	- MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
K	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Tengah	12	Bln	180.000.000	KAZONA TENGAH	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS.LEONIDAS BRAKSAN,M.M../ KAZONA TENGAH	- ASPIN UTOTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
L	Sewa Rumah Jabatan Kepala Zona Timur	12	Bln	150.000.000	KAZONA TIMUR	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.SOS., M.Si.(HAN)/ KAZONA TIMUR	- PETER SIAHANIENIA, S.SOS., M.SI - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
M	Perjalanan Dinas Pimpinan	12	Bln	2.520.576.000	KARO UMUM	KARO REN &ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	UJANG RUSMANA, S.Si., M.T./ KASUBBAG KIK	- ROYADI - ADE KURNIAWAN - IMAM SUDARTO - TRI NURDIANTO, S.EI	TW I-IV	

KODE	URAIAN	VOL.	SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WASGIAT	FPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN FPK	TW	KEF
N	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Barat	12	Bln	222.000.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA BARAT	MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
O	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Tengah	12	Bln	189.000.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS LEONIDAS BRAKSAN, M.M./KAZONA TENGAH	ASPIN UTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
P	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Timur	12	Bln	189.000.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA TIMUR	PETER SIAHAENIA, S.Sos., M.Si - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
Q	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Barat	12	Bln	318.384.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA BARAT	MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
R	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Tengah	12	Bln	354.384.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS LEONIDAS BRAKSAN, M.M./KAZONA TENGAH	ASPIN UTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
S	Perjalanan Dinas Wilayah Zona Maritim Timur	12	Bln	390.384.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA TIMUR	PETER SIAHAENIA, S.Sos., M.Si - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
T	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Barat	12	Bln	146.885.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA BARAT	MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
U	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Tengah	12	Bln	116.495.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS LEONIDAS BRAKSAN, M.M./KAZONA TENGAH	ASPIN UTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
V	Operasional Perkantoran Kantor/SPKKL/GS/Dermaga Zona Maritim Timur	12	Bln	116.495.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA TIMUR	PETER SIAHAENIA, S.Sos., M.Si - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
W	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Barat	12	Bln	12.000.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA BARAT	MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
X	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Tengah	12	Bln	12.000.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS LEONIDAS BRAKSAN, M.M./KAZONA TENGAH	ASPIN UTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
Y	Jasa Pos dan Giro Zona Maritim Timur	12	Bln	12.000.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA TIMUR	PETER SIAHAENIA, S.Sos., M.Si - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
Z	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Barat	12	Bln	476.836.000	KAZONA BARAT	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	HADI PRANTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA BARAT	MARGARETHA KIRANA LESTARI, S.E. - RISGA ZULDEARSI	TW I-IV	
AA	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Tengah	12	Bln	419.305.000	KAZONA TENGAH	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DRS LEONIDAS BRAKSAN, M.M./KAZONA TENGAH	ASPIN UTOYO, S. Kom - SUDARSAWANG, S.Sos	TW I-IV	
AB	Pemeliharaan Stasiun Bumi/SPKKL/Pangkalan Armada Zona Maritim Timur	12	Bln	533.227.000	KAZONA TIMUR	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	ARIF SUMARTONO, S.Sos., M.Si. (Han)/KAZONA TIMUR	PETER SIAHAENIA, S.Sos., M.Si - MILA M. LEKATOMPESY, S.HUT	TW I-IV	
005	Dukungan Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			32.887.300.000							
A	Pemeliharaan dan Operasional Sarana Prasarana Kamla	12	Bln	21.764.500.000	KARO SARPRAS	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	AMREIN, S.E./KARO SARPRAS	M. YUSUF, S.H. - HARDIANSYAH, S.T.	TW I-IV	
B	Pemeliharaan dan Operasional SPKKL/GS Kamla	12	Bln	2.109.400.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./DIR DATIN	INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
C	Pemeliharaan Alat Komunikasi	12	Bln	500.000.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./DIR DATIN	INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW II	
D	Pemeliharaan Peralatan PIM	12	Bln	750.000.000	KA KPIML	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./DIR DATIN	INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW II	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
E	Pemeliharaan Data Center	12	Bln	1.002.000.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./ DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW II	
F	Pemeliharaan Jaringan	12	Bln	400.000.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./ DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
G	Layanan Broadband Data dan Informasi	12	Bln	6.309.200.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./ DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
I	Langganan Lisensi	12	Bln	52.200.000	DIR DATIN	KARO REN & ORG	SESTAMA & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T./ DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurma, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI LAUT

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut			201.876.918.000							
5735.001	Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	14	Kegiatan	103.000.000							
051	Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut			103.000.000							
A	Penyusunan Buku-Buku Pedoman Penyelenggaraan Operasi	1	Pkt	41.550.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW I-IV	
B	Penyediaan Buku-Buku Kapal			18.000.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW I-IV	
C	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut			43.450.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW I-IV	
5735.004	Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri	177	Hari Operasi	170.006.810.000							
051	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri			170.006.810.000							
A	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri	21	Hari Operasi	60.234.009.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW I - IV	
B	Monitoring Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri	3	Kegiatan	62.991.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW I - IV	
C	Operasi Mandiri	90	Hari Operasi	55.071.273.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW III - IV	
D	Operasi Bersama	32	Hari Operasi	27.211.035.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW III - IV	
E	Operasi Khusus	34	Hari Operasi	27.427.502.000	DIR OPSLA	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SUWITO, S.E., M.Si. (Han)/ DIR OPSLA	- LIA PUSPA SARI, A.MD. - RAMADHANTIE KARNAIN	TW III - IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
 Jaksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI UDARA

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut			201.876.918.000							
5735.002	Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim	14	Kegiatan	134.648.000							
051	Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim			134.648.000							
B	Kaji Ulang Evaluasi Operasi Udara			39.420.000	DIR OPSUD	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	OLOT DWI CAHYONO / DIR OPSUD	- FERRY DARMAWAN, S.E. - EDY SETIAWAN, A.MD	TW I - IV	
C	Peninjauan Pelaksanaan Kegiatan Opsudmar			95.228.000	DIR OPSUD	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	OLOT DWI CAHYONO / DIR OPSUD	- FERRY DARMAWAN, S.E. - EDY SETIAWAN, A.MD	TW I - IV	
5735.006	Operasi Udara	396	Jam Terbang	26.939.235.000							
051	Operasi Udara			26.939.235.000							
A	Operasi Udara Maritim BHUANA NUSANTARA	171	Jam Terbang	12.387.420.000	DIR OPSUD	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	OLOT DWI CAHYONO / DIR OPSUD	- FERRY DARMAWAN, S.E. - EDY SETIAWAN, A.MD	TW I - IV	
B	Operasi Udara Maritim GARDA NATUNA	50	Jam Terbang	3.652.605.000	DIR OPSUD	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	OLOT DWI CAHYONO / DIR OPSUD	- FERRY DARMAWAN, S.E. - EDY SETIAWAN, A.MD	TW I - IV	
C	Operasi Udara Maritim GARDA NUSANTARA	175	Jam Terbang	10.899.210.000	DIR OPSUD	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	OLOT DWI CAHYONO / DIR OPSUD	- FERRY DARMAWAN, S.E. - EDY SETIAWAN, A.MD	TW III - IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
 Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT LATIHAN

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut			201.876.918.000							
5735.003	Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	5	Kegiatan	310.907.000							
051	Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut			310.907.000							
A	Rapat Koordinasi dan Perencanaan Latihan	3	Kegiatan	141.582.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I - IV	
B	Rapat Analisa Kebutuhan Latihan Bakamla	1	Kegiatan	80.064.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I - IV	
C	Rapat Evaluasi Direktorat Latihan T.A. 2020	1	Kegiatan	89.261.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW IV	
5735.008	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	880	Orang	4.382.318.000							
051	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut			4.382.318.000							
A	Latihan Long Distance Learning (LDL) On Job Training (OJT) Awak Kapal, Stasiun Pengamat, admin PPK Bakamla RI Tahun 2020			1.346.431.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
B	Pelatihan dan Pembinaan Special Response Team (SRT)			224.500.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
C	Praktek Latihan On Job Training (OJT) Awak Kapal dan Stasiun Pengamat Bakamla RI Tahun 2020			1.393.094.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
D	Diklat Kejuruan ASN Bakamla RI Tahun 2020			302.220.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
E	Latihan Small Boat Operation (MTT-USCG)			38.200.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
F	Latihan Boarding Party Officer I (MTT-USCG)			31.420.000	DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	

G	Pelatihan BST				DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR	WASGLAI	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
H	Training For Maritime Law Enforcement dengan Japan Coast Guard (JCG)				DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR		SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
I	Latihan Menembak Meriam 12,7mm				DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR		SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	
J	Latihan Dokumentasi Udara				DIR LAT	KARO REN & ORG	DEPUTI OPSLA & INSPEKTUR		SANDY MUCHJIDIN LATIEF, S.IP./ DIR LAT	- SAHLANI, S.T. - CECILIA DYAH AFSARI, A.MD	TW I-IV	



**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEBIJAKAN

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKEGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5736	Penyusunan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut			2.606.775.000							
5736.001	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	1	Rekomendasi/ %	1.100.000.000							
051	Perumusan Kebijakan Kamla			382.389.000							
A	Identifikasi dan Pematangan Isu Wilayah Barat			76.876.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
B	Identifikasi dan Pematangan Isu Wilayah Tengah			46.242.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
C	Identifikasi dan Pematangan Isu Wilayah Timur			59.289.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
D	Konsinyering Pembahasan Draft Awal Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional DKI Jakarta (1 KEG)			36.845.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
E	Konsinyering Pembahasan Draft final Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional D.K.I. Jakarta (1 KEG)			113.597.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
F	Rapat Subdit Perumusan Kebijakan			27.620.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
G	Rakor Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bakamla			21.920.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
052	Harmonisasi Kebijakan Kamla			366.558.000							
A	Rapat Subdit Harmonisasi Kebijakan			17.320.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	
B	Rakernis Pertama Harmonisasi Kebijakan Dengan Pakar/Ahli di Jawa Barat (1 KEG)			143.898.000	DIR JAK	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV	

	WASUKRI	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
C	Rakermis Kedua Harmonisasi Kebijakan Dengan Instansi Pemerintah	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
D	Rakermis Ketiga Harmonisasi Kebijakan Dengan Penerima Manfaat dan Masyarakat Pengguna di DKI JAKARTA (1 KEG)	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
E	RTDG Harmonisasi Kebijakan di DKI JAKARTA (1 KEG)	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
053	Monev Kebijakan Kamla				
A	Rapat Internal Subdit Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
B	Rapat Koordinasi monitoring penyenggaraan pengintegrasian Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini Kemanan dan Keselamatan Laut di DKI Jakarta	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
C	Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Nasional	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
D	Monitoring Konsinyering Pembahasan Draft Awal Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional DKI JAKARTA	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
E	Monitoring Identifikasi dan Pematangan Isu Wilayah Barat	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
F	Monitoring Identifikasi dan Pematangan Isu Wilayah Tengah	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
G	Monitoring Rakermis Pertama Harmonisasi Kebijakan Dengan Pakar/Ahli di D.K.I Jakarta	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
H	Monitoring Rakermis Kedua Harmonisasi Kebijakan Dengan Instansi Pemerintah di D.K.I Jakarta	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
I	Monitoring Rakermis Ketiga Harmonisasi Kebijakan Dengan Beneficiaries dan Masyarakat di D.K.I Jakarta	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
J	Monitoring Konsinyering Pembahasan Draft final Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional D.K.I. Jakarta	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV
K	Monitoring RTDG Harmonisasi Kebijakan di DKI JAKARTA	KARO REN &ORG DIR JAK	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR SAMUEL H. KOWAAS, M.SC/ DIR JAK	- M. IBNU SINA, S.PD., M.M. - FRANZESKA DS, S.PD., M.M	TW I-IV

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPa BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT STRATEGI

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WAGSIAT	FPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN FPK	TW	KST
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5736	Penyusunan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut			2.606.775.000							
5736.002	Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut	2	Dokumen /%	406.775.000							
051	Perumusan Strategi Kamla			113.922.000							
A	Kunjungan Koordinasi Lintas Kementerian / Lembaga terkait Rencana Strategi bidang SPD, Operasi Bersama dan Advokasi Hukum			12.102.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-II	
B	Rakernis/Raker/Rakor/Rakornis Perumusan Strategi Kamla			24.785.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-IV	
D	Rapat Rancang Bangun Aplikasi Strategi			16.200.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-IV	
E	Rapat Penyusunan Anggaran Direktorat Strategi Tahun 2021			12.275.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-IV	
F	Rapat Perencanaan Strategi bidang SPD, Operasi Bersama dan Advokasi Hukum			24.280.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I	
G	Rapat Penyusunan Strategi bidang SPD, Operasi Bersama dan Advokasi Hukum			24.280.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-II	
052	Harmonisasi Strategi Kamla			208.053.000							
A	Rapat Triwulan Harmonisasi Strategi Kamla			9.010.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW I-IV	
B	Rapat Koordinasi/Seminar/Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Kamla Bid. Sistem Peringatan Dini dan Operasi			47.450.000	DIR STRA	KARO REN &ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA	- ENNI PARIKAWATI, S.T., M.T. - WIDYAWAN PRABOWO, S.E.	TW-IV	

									ADMIN PPK	TW	KET	
C	Kunjungan Strategis Sinergitas Keamanan Laut				122.503.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	
D	Rapat Perencanaan Harmonisasi Strategi Peringatan Dini				11.140.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	
E	Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Peringatan Dini				17.950.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	
053	Monev Strategi Kamla				84.800.000							
A	Rapat Penyusunan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi				13.900.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	
B	Kegiatan Monitoring				41.700.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	
D	Rapat Evaluasi Tahun 2020				29.200.000	DIR STRA	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	JOKO SUTRISNO, M.Si. (Han)/ DIR STRA		TW I-IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKSIAT	DALSIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut			2.606.775.000							
5736.003	Penelitian dan Pengembangan Kamla	12	Laporan	1.100.000.000							
051	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan			964.143.000							
A	Analisis Penawaran Produk			55.584.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-IV	
B	Rapat Internal Penyusunan Anggaran Penelitian/Kajian/Telaahan staf Direktorat Litbang 2021			8.700.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-II	
C	FGD/RDK Penyusunan Anggaran Penelitian/Kajian/Telaahan staf Direktorat Litbang 2021			18.170.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-II	
D	PENGUATAN FUNGSI DAN PERAN SPKKL			232.940.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW II-III	
E	PENEMPATAN SENSOR SURVEILLANCE SYSTEM BAKAMLA TAHAP II (LRC DAN CR)			455.885.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW II-III	
F	DESAIN UAV BAKAMLA RI TAHAP II: PENYIAPAN PERSONEL PENDUKUNG DAN PENERAPAN SISTEM INTELLIJENSI BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)			192.864.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR	IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHTMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHAEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW II-III	

	WASUJAI	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET		
052	Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan	111.507.000					
A	KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERJASAMA LITBANG	8.784.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHRMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW II
B	KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT KERJASAMA LITBANG 2020	6.984.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHRMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-II
C	KEGIATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN LITBANG 2020	95.739.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHRMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-II
053	Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	24.350.000					
A	PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN DAN KAJIAN	8.587.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHRMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-IV
B	EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN KAJIAN	15.763.000	DIR LITBANG	KARO REN & ORG	DEPUTI JAKSTRA & INSPEKTUR IR. GUNAWAN, S.T., M.TR (HAN), CHRMP/ DIR LITBANG	- HUTOMO PUTRA M.MAR.ARCHEOL - TRIWIBAWA ADISANJOYO, S.T.	TW I-IV

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurjia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

KODE	URAIAN	VOL SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut		214.183.693.000							
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut		9.700.000.000							
5737.001	Data dan Informasi Kamla	49 Kegiatan	1.900.000.000							
051	Mengumpulkan dan Mengelola Data		625.269.000							
A	Pengumpulan Data Dalam Negeri		485.558.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
B	Penyusunan Implementasi Big Data Maritim		139.711.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
052	Sistem Informasi Kamla		625.250.000							
A	Kegiatan Pertukaran Informasi Kamla di Daerah dan Sosialisasi Aplikasi Mobile Dashboard		252.738.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
B	Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi		198.770.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
C	Pengendalian Awal dan Uji Coba Aplikasi Mobile Dashboard di Daerah		173.742.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
053	Sistem Jaringan Kamla		649.481.000							
A	Pengaturan dan Pemutakhiran Jaringan Bakamla		602.261.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	
B	PENYUSUNAN TATA KELOLA TIK SEBAGAI DASAR PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN BAKAMLA		47.220.000	DIR DATIN	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I-IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT HUKUM

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut			9.700.000.000							
5737.002	Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla	37	Kegiatan	1.700.000.000							
051	Pertimbangan dan Advokasi Kamla			470.015.000							
A	Rapat Koordinasi Pertimbangan Hukum			187.227.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
C	Koordinasi Penegakan Hukum Kamla			282.788.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
052	Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Kamla			493.922.000							
A	Koordinasi Penegakan Hukum Kamla (Sosialisasi)			179.809.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
B	Penyuluhan Hukum			249.334.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
C	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keamanan dan Keselamatan Laut			7.750.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
D	Rapat Koordinasi Internal Direktorat Hukum			6.970.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
E	Bimtek Hukum Internasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut			50.059.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
053	Hukum Internasional dan Perancangan Peraturan Per-UU-an Kamla			736.063.000							
A	Kajian Hukum Internasional			104.800.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
B	Webinar Hukum Internasional			138.289.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
C	Rapat Koordinasi Kajian Hukum Internasional			32.600.000	DIR HUKUM	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E.,M.P.A / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	

						WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET	
D	Rapat Internal Terkait Hukum Internasional				13.700.000	KARO REN &ORG DIR HUKUM	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E., M.P.A. / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
E	Rapat Koordinasi Internal				9.880.000	KARO REN &ORG DIR HUKUM	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E., M.P.A. / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
F	FGD Regulasi Keamanan dan Keselamatan Laut				331.490.000	KARO REN &ORG DIR HUKUM	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E., M.P.A. / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	
G	Seminar Regulasi Keamanan dan Keselamatan Laut				105.304.000	KARO REN &ORG DIR HUKUM	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	ERRY HERMAN, S.E., M.P.A. / DIR HUKUM	- NURMALA IMANIAH, S.KOM - AHMAD ZAMRONI	TW I-IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



Aan Kurbia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : DIREKTORAT KERJA SAMA

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keselamatan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut			9.700.000.000							
5737.003	Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla	16	Kegiatan	3.000.000.000							
051	Kerjasama Kamla DN			694.372.000							
A	Koordinasi Internal dan Eksternal KSDN			130.020.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV	
B	Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut			96.462.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II-III	
C	Fasilitasi Kerja Sama Tahap Pembentukan Desa Maritim			190.916.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II-III	
D	Fasilitasi Kerja Sama Tahap Pengembangan Desa Maritim			221.003.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - III	
E	Rapat Kerja Teknis Kerja Sama Dalam negeri			55.971.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II	
052	Kerjasama Kamla LN			1.760.568.000							
A	Rapat Koordinasi Internal			55.350.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV	
B	Rapat Koordinasi Interkementerian			80.720.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV	
C	Review Meeting on MoU Common Guidelines			229.914.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW III-IV	
D	CG TO CG TALK			16.846.000	DIR KERMA	KARO REN & ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW III	

	DAFTAR	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET	
E	Kajian Kerja Sama Luar Negeri	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II
F	CAPACITY BUILDING PROGRAM (Mandat Pilar ke-4 HACGAM)	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II
G	Rapat Koordinasi Kajian Kerja Sama Luar Negeri	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II
H	Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW II
053	Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut	545.060.000					
A	Koordinasi Internal dan Eksternal P2K2L	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV
B	Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV
C	Edukasi Maritim bagi Masyarakat Pesisir/Perbatasan	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV
D	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/Perbatasan - Kegiatan Tim Relawan	DIR KERMA	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	RETIONO KUNTO H., S.E. / DIR KERMA	- HAPPY NURHIDAYAH P, S.E. - CITRA DEWI LESTARI, S.S.	TW I - IV

Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,



**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : UNIT PENINDAKAN HUKUM

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut			9.700.000.000							
5737.004	Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut	45	Kasus	3.000.000.000							
5737.004.002	TANPA SUB OUPUT			3.000.000.000							
051	Penanganan Kasus Kamla			3.000.000.000							
A	TAHAP AWAL			2.910.000.000	KEPALA UPH	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	IMAN WAHYUDI, S.IK., M.Si., M.H. / KEPALA UPH	- SUTISNO - BUDI RAHARJO	TW I - IV	
B	TAHAP PENYELESAIAN			90.000.000	KEPALA UPH	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	IMAN WAHYUDI, S.IK., M.Si., M.H. / KEPALA UPH	- SUTISNO - BUDI RAHARJO	TW I - IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
 Laksamana Madya TNI

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER OUTPUT
 DIPA BAKAMLA RI TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : KANTOR PUSAT INFORMASI MARABAHAYA LAUT

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	LAKGIAT	DALGIAT	WASGIAT	PPK (NAMA/JABATAN)	ADMIN PPK	TW	KET
119.01.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut			214.183.693.000							
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut			9.700.000.000							
5737.005	Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut	4	Kegiatan	100.000.000							
051	Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut			100.000.000							
A	Rapat Internal KPIML			15.371.000	KA KPIML	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I - IV	
B	Onsite Training Pembuatan Anomali Kapal			84.629.000	KA KPIML	KARO REN &ORG	DEPUTI INHUKER & INSPEKTUR	DWI ARIS PRIYONO, S.T. / DIR DATIN	- INDRA AGUSTINA, A.MD - ANDI LYDIA MITHA	TW I - IV	

Kepala Badan Keamanan Laut
 Republik Indonesia,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
 Laksamana Madya TNI